

**PERANAN PERHIMPUNAN PELAJAR-PELAJAR INDONESIA DALAM
UPAYA MENCAPAI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA**

***ROLE-STUDENT STUDENT ASSOCIATION INDONESIA IN EFFORTS TO
ACHIEVE THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA***

Yusinta Tia Rusdiana

Program Studi Pendidikan Sejarah

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang

Yusintat@yahoo.com

Abstrak

Kesadaran dikalangan para pemuda untuk berorganisasi dengan seiring perkembangan gerakan politik banyak menyeret berdirinya organisasi bermunculan namun, tidak diiringi rasa nasionalisme. Keadaan gerakan nasional yang masih bersifat kedaerahan masih dominan. Untuk mengatasi keadaan seperti itu, diperlukan adanya suatu organisasi pemuda yang bersifat netral dan tidak bersifat kedaerahan. Tujuan organisasi pemuda pada dasarnya adalah memperkokoh rasa nasionalisme diantara kalangan pemuda untuk menghindari perpecahan. Tujuan dalam penelitian untuk mengetahui, memaparkan dan menjelaskan tentang peranan perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia dalam menyatukan perkumpulan-perkumpulan pemuda, sehingga memiliki kesamaan visi untuk mencapai Indonesia merdeka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Penulis juga menggunakan pendekatan geografi, sosiologi, politik dan budaya. Prosedur pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian diketahui bahwa perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia merupakan sebagian organisasi yang mengalami perkembangan keorganisasian. Terlihat dari awal berdirinya PPPI tidak terlepas dari peranan pelajar Indonesia di Belanda yang tergabung dalam perhimpunan Indonesia (PI). Melalui Majalah Indonesia Merdeka, PI banyak memberikan masukan pemikiran kearah persatuan. Selain itu Kongres Pemuda I, yang dilaksanakan pada tanggal 30 April-2 Mei 1926 mempunyai pengaruh yang cukup besar. Propaganda persatuan dilancarkan pada kongres tersebut, sehingga memperkuat keinginan para pelajar membentuk persatuan pemuda, maka didirikanlah PPPI pada bulan september 1926. Sesuai dengan anggaran dasarnya, PPPI mempunyai dasar-dasar organisasi yang meliputi tujuan keanggotaan dan kepengurusan. Tujuan utama PPPI adalah menyatukan perkumpulan-perkumpulan pemuda yang telah ada, yang memiliki latar belakang berbeda, sehingga mempunyai satu visi.

Kata Kunci : Perhimpunan Pelajar–Pelajar, Indonesia, Kemerdekaan, republik Indonesia

Abstract

Awareness among the youth to organize in line with the development of a political movement drags its establishment many organizations popping however, not accompanied by a sense of nationalism. The state of the national movement that is still regionalism is still dominant. To cope with such circumstances movement, needed a young organization that is neutral and not regional. Youth oranisasi purpose is basically to strengthen the sense of nationalism among the youth to avoid a split. Interest in research to find, expose and explain the role of the association of Indonesian students in bringing together youth associations, so as to have a common vision to achieve independent Indonesia. The method used in this study is the historical method. The author also uses the approach of geography, sociology, politics and culture. Data collection procedures using literature study and documentation. , The survey results revealed that the association of Indonesian students are some organizations that experienced organizational development. Seen from the inception of GN is inseparable from the role of Indonesian students in the Netherlands who are members of the association Indonesia (PI). Through Magazine Indonesia Merdeka, PI many provide input towards the unity of thought. In addition the first congress, which was held on 30 April-2 May 1926 had a considerable influence. Union propaganda waged in the congress, thus reinforcing the desire of students formed by the union of youth, it was established PPPI in september 1926. In accordance with its articles of association, GN has the basics of organizations including membership and governance objectives. The main goal is to unite association GN-perkumpulan youth who have been there, who have different backgrounds, so as to have onevision.

Keywords: Student Association - Student, Indonesia, Independence, Republic of Indonesia

Pendahuluan

Berbagai kebijakan yang diterapkan telah menyengsarakan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Kemiskinan, kelaparan dan bahkan kematian menjadi dasarnya timbulnya kebencian dalam masyarakat yang berwujud pada beragam perlawanan dari berbagai daerah. Sikap kepahlawanan para pemuda bangsa Indonesia timbul dikarenakan kesadaran untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan, telah mendorong para pemuda bangsa Indonesia dalam bentuk perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Tetapi sikap patriotisme yang sudah tumbuh dalam diri para pemuda belum dilakukan secara terorganisir, dikarenakan rasa persatuan dan kesatuan dalam diri pemuda belum disadari dikalangan pemuda.

Berdirinya Boedi Utomo tercatat sebagai awal kebangkitan kesadaran bangsa Indonesia berjuang secara terorganisir untuk mencapai kebebasan atau kemerdekaan sehingga memasuki periode pergerakan nasional. Di kalangan pemuda Indonesia timbul pula kesadaran untuk berorganisasi, seiring perkembangan gerakan politik ternyata banyak menyeret berdirinya organisasi-organisasi akan tetapi masih banyak bersifat kedaerahan, melihat itu semua pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan untuk menekan kehidupan masyarakat terutama di bidang politik. Selain itu, mereka menerapkan politik memecah belah masyarakat atas dasar suku, ras dan agama. Politik ini dikenal dengan sebutan adu domba atau memecah belah. politik tersebut bertujuan untuk melemahkan kekuatan-kekuatan rakyat agar dengan mudah mereka menguasai keadaan.

Timbul kesadaran di kalangan pemuda bahwa bangsanya telah terperangkap dalam sistem politik yang digunakan Belanda untuk memecah belah kalangan para pemuda. Khawatir politik yang diterapkan pemerintah Belanda menjalar kekalangan pemuda, dan boleh jadi ikut berpengaruh terhadap kentalnya sifat kedaerahan dalam organisasi-organisasi pemuda awal masa pergerakan nasional. Menyadari perlunya rasa persatuan dan kesatuan dalam perjuangan. Begitu pun dengan organisasi-organisasi pemuda yang semula bersifat kedaerahan ikut terpengaruh oleh gagasan tersebut. Terasa ada upaya yang mengarah kepada penyatuan organisasi pemuda tersebut. Barangkali yang merupakan keinginan tokoh-tokoh pemuda pendiri Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (Sri Sutjiatiningsih, 1999; 22).

Awalnya pembentukan PPPI berasal dari pemuda pelajar Sekolah Tinggi Kedokteran dan Sekolah Tinggi Hukum. Para pemuda pelajar tersebut, sejak tahun 1925, seringkali mengadakan diskusi-diskusi masalah politik. Mereka antara lain adalah Muksinun, Suwirjo, Usman, Sastroamidjojo, Sigit, Gularso, Darwis, Surjono, Susalit dan Soegondo Djojopoespito. Pembentukan organisasi PPPI juga tidak terlepas dari pengaruh para pelajar Indonesia di Belanda. Para pelajar Indonesia yang sedang belajar di Belanda yang tergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI) memberikan dorongan semangat besar dalam pembentukan PPPI. Bahkan lahirnya kesadaran akan perlunya pembentukan organisasi pemuda yang bersifat nasional adalah buah pemikiran para tokoh PI melalui majalah yang diterbitkannya yaitu Indonesia Merdeka (Sudiyo; 199; 112).

Pada bulan september 1926, para pemuda pelajar yang sering berdiskusi mengenai masalah-masalah politik, sepakat untuk mendirikan perkumpulan pemuda pelajar yang bernama perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia (PPPI). PPPI didirikan pada bulan september karena perkuliahan waktu itu dimulai pada bulan September, pada waktu para mahasiswa bisa belajar dan bisa berkumpul lagi. PPPI beranggotakan para mahasiswa, pada waktu itu perkataan mahasiswa belum begitu populer. Murid-murid perguruan tinggi juga masih disebut pelajar-pelajar Indonesia, jika sekarang dapat disebut perhimpunan mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Oleh karena kata mahasiswa belum begitu tenar, maka organisasi itu atau perkumpulan mahasiswa tersebut dinamakan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau sering disingkat PPPI (Sagimun M.D; 1984; 141). Sebagai organisasi yang bergerak dalam perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka, maka kegiatan PPPI tidak terlepas dari kegiatan politik. Dalam kegiatannya, PPPI tidak hanya mengkhususkan diri dalam kegiatan politik, namun juga merambah ke bidang kehidupan lainnya seperti bidang sosial-budaya dan ekonomi. Dalam kegiatan di bidang politik PPPI merupakan penggerak utama terselenggaranya Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres yang berlangsung pada tanggal 27-28 Oktober 1928 oleh berbagai pihak diakui sebagai kongres yang menghasilkan tonggak sejarah yang amat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sebagai satu bangsa dengan segala keanekaragamannya. Dalam kongres ini, ketua PPPI Soegondo Djojopoespito dipercaya menjadi ketua kongres. Hal ini sekaligus memperlihatkan keberhasilan PPPI dalam melaksanakan kegiatan politik. Pelaksanaan Kongres Pemuda II tidak terlepas dari pelaksanaan Kongres Pemuda I di Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 30 April-2 Mei 1926. Dalam kongres tersebut cita persatuan belum dapat diterima

secara bulat oleh para peserta, akan tetapi aktivitas gerakan pemuda semakin meningkat (Sri Sutjiantiningsih; 1999; 24).

Kegiatan PPPI juga meliputi kegiatan di bidang sosial-budaya dan ekonomi. Salah satu kegiatan penting dalam bidang sosial adalah usaha meningkatkan pendidikan bagi masyarakat umum melalui Perguruan Rakyat. Untuk mencapai masyarakat yang maju, pendidikan adalah aspek yang perlu diperhatikan. PPPI membantu rekan-rekan dari perkumpulan lain untuk mendidik masyarakat yang belum dapat merasakan pendidikan. Mereka membantu mengajar disamping itu mereka para anggota PPPI juga diminta untuk membantu memberantas buta huruf yang masih banyak saat itu dan juga memberi pengajaran bahasa melayu yang masih belum merata penyebarannya. Keterlibatan PPPI sesuai dengan watak dan asas national Paedagogis ; artinya bersifat pendidikan nasional. Di dalam kongresnya yang pertama, yakni pada tanggal 20-24 September 1930, PPPI telah mengambil keputusan yang mempertegas tujuan PPPI, yakni : “mencapai Indonesia merdeka menjadi kewajiban yang semulia-mulianya bagi anak Indonesia”. Kegiatan PPPI di bidang budaya yang utama adalah usaha PPPI dalam melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kebudayaan yang menjadi pusat perhatian adalah bidang seni tari. Seni tari yang banyak dipelajari adalah seni tari Jawa, disebabkan oleh banyaknya anggota PPPI yang berasal dari suku Jawa (Sagimun M.D; 1990; 144).

Kegiatan PPPI di bidang ekonomi kegiatan utama yang dilakukan PPPI adalah ingin mengintensifkan peranan petani dalam meningkatkan produksinya. Petani untuk mencapai produksi pertanian yang tinggi haruslah dilindungi dalam menggunakan haknya. Sebagai pelajar Sekolah Tinggi Hukum para anggota PPPI berusaha

menjelaskan agar hak milik tanah para petani jangan sampai jatuh ketangan orang yang tidak berhak. Proses perkembangan organisasi pergerakan nasional di Indonesia sudah barang tentu tidak akan terlepas dari sikap atau reaksi pemerintah kolonial Belanda. Dalam realitanya sikap pemerintah dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para penguasa kolonial, khususnya para Gubernur Jendral. Kepribadian para Gubernur Jendral-lah yang merupakan faktor penentu sikap pemerintah dalam mengeluarkan kebijaksanaan politiknya terhadap organisasi pergerakan nasional. Faktor lain yang menentukan kebijaksanaan pemerintah tersebut dapat juga ditentukan oleh sikap dan sifat organisasi itu sendiri. Ia akan dipandang tidak akan membahayakan kedudukan kolonial, sedangkan ia bersikap hati-hati terhadap organisasi yang bersikap radikal, seperti yang telah dikemukakan oleh Sartono Kartodirjo “Dalam menghadapi aksi-aksi yang dilancarkan oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional yang semakin gencar dan radikal itu. Pemerintah kolonial merasa semakin terancam kedudukan dan otoritasnya sehingga tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap aksi-aksi tersebut”.(Kartodirjo; 1993; 147).

Gerakan pemuda termasuk seperti organisasi pergerakan nasional lainnya tidak bebas dari pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Pada hakikatnya gerakan pemuda juga sama dengan organisasi pergerakan nasional lain terutama partai-partai nasional, yang berbeda hanya usia dari anggotanya. Dalam soal nasionalisme gerakan pemuda sering lebih berani dan lebih fanatik dari pada partai-partai nasional. Oleh karena itu pengawasan terhadap gerakan pemuda oleh pihak pemerintah juga tidak berbeda. Pembekuan dan larangan bersidang juga dikenakan pada gerakan pemuda (Slamet Mulyono; 1986; 97). Setelah ada larangan kongres, terutama sejak tahun 1936

pengaruh PPPI terasa lebih berkurang dikalangan organisasi pemuda lainnya. Selain itu, pengaruh PPPI semakin menurun karena makin banyaknya organisasi pelajar dan mahasiswa, yang dapat dimasuki oleh para pemuda pelajar. Salah satu organisasi yang menyedot banyak anggota PPPI adalah (Unitas Studiosorum Indonesianesis) USI yang didirikan atas desakan para dosen Belanda (Ensiklopedi Nasional Indonesia; 1990; 64). Sejak tahun 1936, pengaruh PPPI semakin merosot, kegiatannya menurun dan keberadaannya mulai digantikan oleh organisasi-organisasi pemuda pelajar yang lain. Perpecahan yang terjadi dikalangan pemuda akibat pembentukan perkumpulan baru itu, tidak menyurutkan langkah PPPI untuk berkiprah. Mereka yang tetap setia dengan hasil Kongres Pemuda II tetap mempertahankan diri dalam PPPI. Mereka terus melakukan kegiatan walaupun pemerintah Hindia Belanda terus menekan dan memecah belah gerakan mereka.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Metode historis adalah pengumpulan yang sistematis dan evaluasi yang obyektif dari data yang berkaitan dengan kejadian-kejadian masa lampau untuk menguji hipotesis sehubungan dengan sebab akibat atau kecendrungan kejadian-kejadian tersebut yang dapat membantu menerangkan kejadian masa kini dan mengantisipasi kejadian masa yang akan datang (Sumardi Suryabrata; 2000; 16). Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang diteliti maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik kepustakaan dan teknik dokumentasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Tentang Latar Belakang Berdirinya PPPI

Pengaruh modal besar pemerintah Hindia Belanda makin besar pada masa pemerintahan Gubernur Jendral Fock. Sebagai pemerintah bersifat otokratis Fock mengabaikan kekuatan rakyat yang sedang berkembang. Sementara itu politik penghematan dilaksanakan secara ketat sehingga mengakibatkan pengangguran pada semua lapisan dan banyak tenaga yang disia-siakan. Peraturan-peraturan itu menimbulkan kekecewaan, bahkan kekesalan kaum terpelajar. Di bawah pimpinan tokoh-tokoh pergerakan mulai dilancarkan pemogokan-pemogokan sebagai protes terhadap tindakan-tindakan protes terhadap pemerintah. Politik dari Fock selalu didasarkan atas prinsip etis meskipun menurut kenyataannya ada kecurigaan terhadap organisasi-organisasi Indonesia dan menentang perluasan kekuasaan golongan pribumi. Akibat langsung dari politik Fock sejak 1922 tidak lain ialah radikalisasi pergerakan nasional. Dalam dewan rakyat muncul konsentrasi radikal, gerakan non-koperasi terhadap pemerintah kolonial mulai meluas di kalangan kaum terpelajar. Aliran terakhir ini sangat condong ke arah gerakan sosialis yang sejak tahun belasan sangat berpengaruh dalam pergerakan nasional.

Muncul ide pembentukan PPPI berasal dari pemuda pelajar Sekolah Tinggi Kedokteran dan Sekolah Tinggi Hukum para pemuda pelajar tersebut, sejak Tahun 1925 sering kali mengadakan diskusi-diskusi masalah politik. Mereka antara lain adalah: Muksinun, Suwiryono, Usman Sastroamidjojo, Sigit, Gularso, Darwis, Surjono, Susalit dan Soegondo Djojopoespito. Pokok masalah yang sering dibicarakan adalah keadaan gerakan nasional yang masih bersifat kedaerahan masih dominan di antara pemuda Indonesia, sehingga sering terjadi perbedaan-perbedaan sempit yang mengunggulkan sukunya. Untuk mengatasi keadaan seperti itu, diperlukan adanya suatu organisasi pemuda yang bersifat netral dan

tidak bersifat kedaerahan. Tujuannya agar aspirasi pelajar dan pemuda yang menginginkan adanya kesatuan dan persatuan di antara para pemuda dapat tercapai. Selain melihat tidak adanya persatuan di antara pemuda daerah, mereka juga melihat keadaan masyarakat yang tertekan akibat dari penerapan sistem kolonial dari pemerintah jajahan (45 Tahun Sumpah Pemuda; 1974; 211).

Sistem kolonial yang diterapkan pemerintah jajahan sangatlah merugikan rakyat Indonesia. Pemerintahan kolonial Belanda menguasai dan mengatur kehidupan masyarakat terutama di bidang politik. Selain itu, mereka menerapkan politik memecah belah masyarakat atas dasar suku, ras, dan agama. Politik ini dikenal dengan Politik *Devide Et Impera*. Politik tersebut bertujuan untuk melemahkan kekuatan-kekuatan rakyat agar dengan mudah mereka menguasai keadaan. Perpecahan yang diciptakan oleh penjajah ini juga menjalar ke kalangan pemuda, dan boleh jadi hal ini ikut berpengaruh terhadap kentalnya sifat kedaerahan dalam organisasi-organisasi pemuda pada awal masa pergerakan nasional. Sesungguhnya sifat kedaerahan itu merupakan hal yang wajar dan alami, sepanjang tidak merugikan perjuangan. Akan tetapi, sejarah mencatat bahwa golongan pemuda terpelajar jugalah yang pertama kali menyadari nasib bangsanya dalam sistem kolonial, dan nasib bangsanya hanya dapat diperbaiki dengan menghilangkan sistem kolonial tersebut.

Berbekal kemampuan intelektual yang dimilikinya, para pemuda pelajar memelopori lahirnya pergerakan nasional. Dalam perjalanan selanjutnya, tokoh-tokoh pergerakan ini makin menyadari perlunya persatuan dan kesatuan dalam perjuangan. Begitupun dengan organisasi-organisasi pemuda yang semula bersifat kedaerahan ikut terpengaruh oleh gagasan tersebut.

Terasa ada upaya yang mengarah kepada penyatuan organisasi pemuda tersebut. Inilah barang kali yang merupakan keinginan tokoh-tokoh pemuda pendiri PPPI. Ide pembentukan organisasi PPPI juga tidak terlepas dari pengaruh para pelajar Indonesia di Belanda. Para pelajar Indonesia yang sedang belajar di Belanda dan tergabung dalam Perhimpunan Indonesia (PI) memberikan dorongan semangat yang besar dalam pembentukan PPPI. Bahkan lahirnya kesadaran akan perlunya pembentukan organisasi pemuda yang bersifat nasional adalah buah pemikiran para tokoh PI melalui majalah yang diterbitkannya yaitu *Indonesia Merdeka* (Sudiyo; 1991; 112).

Pada bulan September 1926, para pemuda pelajar yang sering berdiskusi mengenai masalah-masalah politik, sepakat untuk mendirikan perkumpulan pemuda pelajar yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI). PPPI didirikan pada bulan September karena perkuliahan dimulai pada bulan September, pada waktu para mahasiswa bisa belajar dan berkumpul lagi. Dari berbagai sumber yang ditelaah, penulis tidak menemukan tanggal pembentukan dan tempat pendirian PPPI secara pasti. Kongres Pemuda I yang dilaksanakan pada bulan 30 April – 2 Mei 1926 juga mempunyai peran penting dalam pembentukan organisasi PPPI. Walaupun kata sepakat di antara pemuda untuk melebur ke dalam satu wadah belum tercapai, akan tetapi aktivitas gerakan pemuda semakin meningkat (laporan Kongres Pemuda I, terjemahan; 1981: 22-23). Propoganda persatuan yang dilancarkan pada Kongres Pemuda I, nampaknya langsung atau tidak langsung telah mempengaruhi para pemuda pelajar untuk merealisasikan persatuan pemuda, khususnya pemuda pelajar. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pendirian PPPI pada bulan September 1926, setelah dilaksanakan

Kongres Pemuda I (Cahyo Budi Utomo; 1995; 133).

PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia beranggotakan para mahasiswa. Pada waktu itu perkataan mahasiswa belum begitu populer. Murid-murid perguruan tinggi juga masih disebut pelajar-pelajar. Jadi PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, jika sekarang dapat disebut Perhimpunan Mahasiswa-Mahasiswa Indonesia (Sagimun M.D; 1984; 141). Oleh karena kata mahasiswa belum tenar, maka organisasi itu atau perkumpulan mahasiswa tersebut dinamakan Pelajar-Pelajar Indonesia atau sering pula disingkat PPPI. Pelajar sendiri mengandung arti mereka yang kelak menjadi orang terpelajar. Pada waktu itu pemuda dari sekolah lanjutan (MULO dan AMS) disebut murid. Muhammad Yamin pernah mengusulkan istilah mahasiswa bagi sebutan student, tetapi rupanya belum dapat diterima di kalangan masyarakat. Selain itu, sebutan mahasiswa dianggap istilah yang terlalu bombastis (Sutrisno Kutoyo; 1975; 19). Sebagai organisasi pemuda pelajar, organisasi ini mempunyai gerakan atau kegiatan yang bersifat positif dalam mencapai cita-cita kemerdekaan. Sebagai harapan bangsa pemuda pada umumnya bersifat dinamis, berani dan sering merupakan pelopor dalam perjuangan. Kemajuan pemikiran yang didapat dari pendidikan, menuntut mereka untuk mengadakan perubahan lingkungan ke arah kebebasan bernegara dan berbangsa (Mardanas Safwan; 1998; 12)

1. Dasar-dasar Organisasi

Dalam pembentukan PPPI para pendirinya juga membentuk anggaran dasar organisasi yang berisi dasar-dasar organisasi (asas dan tujuan, kepengurusan, keanggotaan, dan lain-lain). Pembahasan berikut memuat hal-hal tersebut di atas, juga dikemukakan latar belakang keanggotaan,

walaupun bukan merupakan dasar organisasi, untuk menambah pemahaman keanggotaan PPPI secara lengkap. Penulis sejujurnya tidak dapat menemukan anggaran dasar PPPI secara lengkap. Berbagai sumber yang ada hanya menuliskan beberapa inti dari anggaran dasar PPPI, oleh karena itu pemaparan yang akan dikemukakan bukan pembahasan dasar-dasar organisasi secara lengkap.

Asas dan Tujuan PPPI

PPPI berdiri berdasarkan atas kebangsaan Indonesia dan atas Kolonial Antithese, artinya berdiri atas perbedaan-perbedaan antara kaum yang menjajah (Belanda) dan kaum yang terjajah (bangsa Indonesia) (Pringgodigdo; 1993; 54). Sejak dari pangkalan, asas dan gerak usaha PPPI semua berdasarkan perbedaan kedudukan antara kaum yang terjajah dan kaum yang dijajah. PPPI memperhatikan dan merasakan penderitaan rakyat Indonesia sebagai akibat penjajahan Belanda. Tegasnya, PPPI lahir di tengah-tengah kehidupan rakyat Indonesia yang menderita akibat penjajahan Belanda. PPPI bertujuan untuk menyatukan perkumpulan-perkumpulan pemuda yang telah ada, yang umumnya memiliki latar belakang budaya, lokalitas, dan etnisitas yang berbeda (Sagimun M.D; 1984; 141). Tujuan PPPI secara lengkap dikemukakan dalam oleh R.Z. Leirissa yang dikutip sebagai berikut:

1. Memperkuat ikatan pemuda-pemuda pelajar seluruh daerah di Indonesia dan berusaha menghilangkan rasa mementingkan Semangat daerah, sehingga tercapai persatuan bangsa di antara pemuda.
2. Mencapai Indonesia merdeka yang merupakan tujuan mulia bagi anak Indonesia.
3. Mempertinggi semangat kesatria, agar dapat bertenaga dengan seteguh-teguhnya untuk membela

dan mengabdikan diri kepada tanah air dan bangsa menurut keyakinannya dan kecakapan-kecakapan masing-masing.

4. Mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang berilmu dan berjiwa nasional.
5. Mendidik anggota-anggotanya menjadi pemimpin rakyat yang insyaf atas kewajibannya untuk menyiapkan bangsa Indonesia merdeka.
6. Berjuang untuk kemerdekaan bangsa dan mengidamkan Indonesia Raya Merdeka.

Untuk mencapai tujuan tersebut, penanaman rasa persatuan untuk menghilangkan rasa semangat kemerdekaan yang sempit merupakan tugas pokok bagi PPPI. Organisasi ini ingin lebih meningkatkan peranan pemuda dalam pergerakan nasional Indonesia. PPPI menganggap bahwa provinsialisme atau sifat dan jiwa kedaerahan harus dibuang karena memperlemah persatuan Indonesia. PPPI menghendaki anggota-anggotanya berpolitik, tidak hanya bersenang-senang atau belajar saja, agar wawasannya lebih luas dan siap menghadapi tantangan sehingga sanggup menderita apabila menghadapi hambatan dan tantangan (Sie Konversi dan Preparasi Museum Sumpah Pemuda; 1987; 10).

B. Kegiatan PPPI Dalam Upaya Mencapai Kemerdekaan Republik Indonesia

Sebagai organisasi yang lahir ditengah-tengah kehidupan rakyat Indonesia yang menderita akibat penjajahan Belanda. PPPI bergerak dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Kegiatan politik merupakan kegiatan yang tidak terlepas dari kegiatan PPPI. Ini semua terlihat bahwa PPPI tidak hanya sepenuhnya bergerak di bidang politik, kenyataannya

PPPI juga bergerak di bidang sosial-budaya dan bidang ekonomi.

1. Kegiatan PPPI Dalam Bidang Politik

Salah satu peristiwa sejarah, dimana banyak pihak mengakui bahwa PPPI menyumbangkan saham besar, adalah terselenggaranya Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres yang berlangsung pada tanggal 27-28 Oktober 1928 itu, oleh berbagai pihak diakui sebagai kongres yang menghasilkan tonggak sejarah yang amat penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia sebagai satu bangsa dengan segala keanekaragamannya. Dalam kongres ini, ketua PPPI, Soegondo Djojopoespito, dipercaya menjadi ketua kongres. Hal ini sekaligus memperlihatkan keberhasilan PPPI dalam melaksanakan kegiatan politik. Pelaksanaan Kongres Pemuda II tidaklah terlepas dari pelaksanaan Kongres Pemuda I di Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 30 April-2 Mei 1926. dalam kongres tersebut cita-cita persatuan belum dapat diterima secara bulat oleh para peserta. Keadaan ini timbul karena dalam diri pemuda masih ada keraguan dan kesalahpahaman (Ariwiadi; 1971; 158).

Upaya mempersatukan perkumpulan-perkumpulan pemuda yang telah dirintis oleh Kongres Pemuda I terus dilanjutkan. Wakil-wakil organisasi pemuda terus mengadakan pertemuan demi kesatuan pendapat. Pada pertemuan tanggal 20 Februari 1927 PPPI telah ikut ambil bagian, tetapi pertemuan tersebut belum mencapai hasil yang final. Setelah itu PPPI-lah yang mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan-pertemuan selanjutnya (Sri Sutjiatiningsih; 1999; 24). Di kalangan partai-partai politik telah terbentuk persatuan, yaitu suatu federasi partai-partai politik yang terdiri dari PNI, PSI, BU, Pasundan, Kaum Betawi, Sumatranen Bond, dan Studie-Studie Club, sehingga jiwa persatuan memenuhi udara politik di tahun

1928 itu. Di kalangan pemuda sendiri, kesatuan pendapat belum tercapai. Bentuk fusi atau federasi masih tetap merupakan perdebatan. Karena itu, dalam suatu pertemuan antara wakil-wakil perkumpulan pemuda diputuskan untuk membawa persoalan tersebut dalam suatu rapat umum (kongres) (Sri Sutjiatiningsih; 1999; 25). Persiapan untuk mengadakan kongres itu dilakukan dengan cermat dan matang; rapat-rapat untuk membahas masalah itu terus dilakukan. Dalam rapat tanggal 3 Mei 1928 dan Agustus 1928 di Gedung *Indonesische Clubhuis* Jakarta, hadir utusan-utusan organisasi pemuda seperti: PPPI, Jong Ambon, Jong Bataks dan Kaum Pemuda Betawi. Rapat ini menurut antara lain memutuskan sebagai berikut:

1. Segala perkumpulan yang tertera di atas ini akan mengadakan kerapatan (kongres) di Weltevreden yaitu bulan Oktober 1928, lamanya sehari 2 malam.
2. Ongkos akan dipikul oleh perkumpulan yang ikut bekerja dan hadir.
3. Pada beberapa tempat di seluruh Indonesia akan diadakan cabang-cabang pengurus yang bekerja untuk keperluan rapat dan mengumpulkan uang.
4. Akan meminta perkumpulan lain supaya ikut bekerja atau melahirkan kesukaannya dengan kerapatan (Pemuda Sumatra; Sepetember 1928; 2).

Setelah dipersiapkan secara matang, maka pada tanggal 27-28 Oktober 1928 dilaksanakanlah Kongres Pemuda II. Tempat Kongres berpindah-pindah yaitu di Gedung *Katholieke Jongelenge* (Jalan Lapangan Benteng sekarang) pada tanggal 27 Oktober 1928 sekaligus pembukaan; Gedung *Oost Java Bioscoop*, Jalan Medan Merdeka Utara No. 14. (Gedung Pemuda, sekarang sudah

dibongkar) pada sidang II; Gedung *Indonesische Clubgebouw*, Jalan Kramat Raya No. 106 (sekarang Gedung Sumpah Pemuda) pada sidang III (Dalimun Santoso; 2001; 9-10). Tokoh-tokoh perseorangan dan anggota organisasi pergerakan yang hadir dalam kongres adalah sebagai berikut: S. Mangoesarkoro, Purnomo wulan, Mr. Moeh Nazif, Siti Soendari, Djaksodipuro, Koenjoro Purbapranoto, Emma Puradiredja, Mohammad Roem, Soekmono, Soemanang, Soejadi, dien Pantouw, Dali, Syahbudin Latief, Antapermana, Theo Pangemanan, Sulaiman, Kartomenggolo, Anwari, Sumarto, Masdani, Tumboel, Tamzit Jo Tambunan, A K. Gani, Soewarni, Kasman Singodimedjo, Moh Husni Thamrin, dan Kusman Utoyo (*45 Tahun Sumpah Pemuda*; 1974; 134-135).

2. Kegiatan PPPI Dalam Bidang Sosial-Budaya

Kegiatan PPPI juga meliputi kegiatan di bidang sosial dan budaya. Salah satu kegiatan penting dalam bidang sosial adalah usaha meningkatkan pendidikan bagi masyarakat umum melalui *Perguruan Rakyat*. Untuk mencapai masyarakat yang maju, pendidikan adalah aspek penting yang perlu diperhatikan. Adanya peraturan Pemerintah Hindia Belanda yang mengatur kehidupan sekolah-sekolah pertikelir dengan “Undang-Undang Sekolah Liar (Wilde Scholen Ordonantie)”, sangat menghambat tujuan upaya mencerdaskan bangsa. Namun adanya larangan ini tidak menyurutkan langkah para tokoh pergerakan dalam mendirikan sekolah-sekolah. Para tokoh tersebut tetap menjalankan sekolah-sekolah pertikelir, Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa-nya, tokoh-tokoh PNI dengan Perguruan Rakyatnya (*Persatuan Indonesia*; 12 September 1932; 3).

Melihat situasi yang tidak menguntungkan ini para anggota PPPI tetap membantu pendidikan rakyat, dengan membantu salah satu perguruan yaitu

Perguruan Rakyat. Perguruan ini dipilih karena hubungan yang akrab antara anggota PPPI dengan anggota PNI. Dalam *Indonesia Raya* (Maret 1935), dikatakan bahwa pada bulan September 1929, PPPI telah membantu Perguruan Rakyat. Mereka membantu rekan-rekan dari perkumpulan lain untuk mendidik masyarakat yang belum dapat mengecap pendidikan. Mereka membantu memberantas buta huruf yang masih banyak saat itu dan juga memberi pengajaran bahasa melayu yang masih belum merata penyebarannya. Keterlibatan PPPI ini sesuai dengan watak dan asas “national pedagogis”, artinya bersifat pendidikan nasional. Di dalam kongresnya yang pertama, yakni pada tanggal 20-24 September 1930, PPPI telah mengambil keputusan yang mempertegas tujuan perjuangan PPPI, yakni : “*Mencapai Indonesia Merdeka menjadi kewajiban yang semulia-mulianya bagi anak Indonesia*” (Sagimun M.D; 1990; 144).

Selain kegiatan di bidang pendidikan, kegiatan yang tak kalah pentingnya ialah kegiatan publikasi. PPPI melalui komisi publikasinya berusaha untuk memajukan masyarakat dengan memberikan pengertian-pengertian hak dan kewajiban yang dimiliki setiap penduduk, juga disinggung mengenai kewajiban mereka terhadap tanah air dan bangsanya dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Brosur lain yang diterbitkan adalah “Hak Kemerdekaan Diri” yang diterbitkan pada bulan April 1932. Inti dari isi brosur ini juga tidak terlepas dari usaha menyadarkan masyarakat dalam perjuangan kemerdekaan (Ahmaddani G. Martha; 1935; 143). Kegiatan PPPI di bidang budaya yang utama adalah usaha PPPI dalam melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kebudayaan yang menjadi pusat perhatian adalah bidang seni tari. Seni tari yang banyak dipelajari adalah seni tari Jawa, hal ini disebabkan oleh banyaknya anggota PPPI yang berasal dari suku Jawa. Hasil dari latihan itu biasanya akan dipentaskan dalam

acara-acara penting peringatan hari-hari yang dianggap penting oleh organisasi. Pementasan itu juga sering dilakukan untuk mencari dana untuk menutupi biaya dalam kegiatan organisasi. Tarian yang sering dipagelarkan adalah Tari Serimpi, biasanya diselingi dengan pertunjukan tonil (sandiwara dan nyanyi).

3. Kegiatan PPPI Dalam Bidang Ekonomi

Pada bidang ekonomi kegiatan utama yang dilakukan adalah ingin menginfestasikan peranan petani dalam meningkatkan produksinya. Petani untuk mencapai produksi pertanian yang tinggi haruslah dilindungi dalam menggunakan haknya. Melalui usaha pendekatan yang intensif para petani diberikan pengertian akan hak tanahnya, sebagai pelajar Sekolah Tinggi Hukum para anggota PPPI berusaha menjelaskan agar tanah milik sebagai tempat berproduksi jangan sampai jatuh ketangan orang yang tidak berhak. Tanah para penduduk asli tidak dapat dimiliki oleh bangsa asing, sesuai dengan STB 1875, 179 yang berbunyi: Hak atas tanah tak dapat dijual oleh bangsa Indonesia kepada bangsa yang bukan bangsa Indonesia. Penjualan tanah yang dilakukan bangsa Indonesia kepada bangsa asing ialah dilarang kecuali terjadi penjualan yang sengaja seperti bangsa Indonesia kawin dengan bangsa asing. Penerangan yang intensif itu dilakukan agar tanah-tanah bangsa Indonesia tidak jatuh ke tangan bangsa asing, karena bila tanah tersebut jatuh ke tangan bangsa asing keadaan ekonomi bangsa Indonesia akan kacau, karena sektor produksi dikuasai bangsa asing, akibatnya tidak terjangkau oleh penduduk (*Indonesia raya*; Januari-Februari 1932; 4).

C. Peranan PPPI Dalam Upaya Mencapai Kemerdekaan Republik Indonesia

Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) lahir pada bulan September 1926 berdasar atas kebangsaan Indonesia dan atas perbedaan-perbedaan antara kaum terjajah dan kaum menjajah. Sejak dari pangkalnya, asas dan gerak usaha berdasarkan atas itu semua mereka lebih mementingkan nasib rakyat Indonesia yang menderita akibat penjajahan Belanda. Tegasnya, mereka lahir ditengah-tengah kehidupan rakyat Indonesia yang menderita akibat penjajahan Belanda. Sikap selalu berjuang serta berusaha dengan sekuat tenaga mempersatukan tenaga para pemuda-pemuda Indonesia dalam persatuan dan kesatuan kebangsaan Indonesia. Organisasi yang selalu menjunjung tinggi semangat persatuan dan kesatuan serta kesadaran kebangsaan Indonesia. Mereka tidak mau lagi dipecah belah serta menentang politik *divide et impera* yang dipergunakan dengan sangat mahir oleh kaum penjajah Belanda. PPPI berusaha untuk mendidik serta melatih anggota-anggotanya menjadi calon-calon pemimpin kebangsaan Indonesia. Karena mereka mempunyai tujuan perjuangan untuk menghapuskan dan melenyapkan penjajahan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Anggota PPPI berperan aktif di dalam segala bidang, bidang politik, bidang sosial-budaya dan bidang ekonomi. Kegiatan yang dilakukan adalah ikut aktif di dalam panitia untuk mendirikan Gedung Pemufakatan Indonesia, selain itu mereka juga turut di dalam komisi Pengajaran Perguruan Rakyat. Bahkan pada tahun 1929 sejumlah 14 orang anggota PPPI turut membantu Perguruan Rakyat sebagai guru atau tenaga pengajar. Mereka juga turut aktif di dalam penyelenggaraan Pemberantasan Buta Huruf demi tercapainya masyarakat Indonesia maju. Organisasi PPPI merupakan lembaga pendidikan dan latihan sosial serta juga menjadi tempat pendidikan dan latihan perjuangan dan kebangsaan Indonesia. Disini para anggota PPPI dididik dan dilatih untuk menjadi

kader-kader dan calon-calon pemimpin bangsa yang sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya.

Pada waktu sunarko menjadi ketua, maka didirikanlah suatu Komisi Publikasi. Tugas dari Komisi Publikasi ini adalah menerbitkan buku-buku dan brosur-brosur yang sangat dibutuhkan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. PPPI juga menerbitkan sebuah majalah yang mereka namakan *Indonesia Merdeka*. Majalah ini merupakan sarana sebagai tempat menyampaikan semangat persatuan dan kesatuan kekalangan para pemuda dan masyarakat Indonesia. Meskipun sering mendapat rintangan dan halangan, namun para mahasiswa anggota-anggota PPPI tetap gigih dalam perjuangan merintis kemerdekaan Indonesia. Salah seorang tokoh dan ketua redaksi majalah *Indonesia Raya* adalah Abu Hanifab. Meskipun PPPI dan PI di negeri belanda secara organisasi berdiri sendiri-sendiri serta berjauhan tempatnya, namun ada hubungan sangat erat dan akrab antara kedua organisasi mahasiswa Indonesia itu. Majalah *Indonesia Merdeka* yang diterbitkan oleh perhimpunan Indonesia di negeri Belanda banyak dibaca oleh anggota PPPI, meskipun cara memperolehnya tidak dilakukan secara terang-terangan karena hambatan dari Pemerintah Kolonial Belanda (Sagimun, 1998; 141).

Pada waktu pemerintah kolonial Belanda bertindak keras membubarkan PNI dan menangkap serta mengasingkan pemimpin partai itu, semangat para mahasiswa sedikitpun tidak patah. Bahkan semangat kemerdekaan mereka makin bergelora dan cita-cita mereka dalam upaya makin mantap. Melihat itu semua sudah barang tentu tidak akan terlepas dari sikap atau reaksi pemerintah kolonial Belanda. Dalam realitanya sikap tersebut dapat dilihat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para penguasa kolonial, khususnya para gubernur jendral. Kepribadian para gubernur

jendral-lah yang merupakan faktor penentu sikap pemerintah dalam mengeluarkan kebijaksanaan politiknya terhadap organisasi pergerakan nasional. Tanggapan dan tindakan gubernur jendral yang berkuasa mencerminkan bagaimana pendirian dan sejauh mana mereka bersikap moderat atau reaksioner. Gubernur jendral yang moderat lebih memungkinkan bagi tumbuhnya organisasi pergerakan, sedangkan sebaliknya yang bersikap reaksioner akan mengakibatkan lemahnya pergerakan. Faktor lain yang menentukan kebijaksanaan pemerintah tersebut dapat juga ditentukan oleh sikap dan sifat organisasi itu sendiri. Ia akan dipandang tidak akan membahayakan kedudukan kolonial, sedangkan ia bersikap hati-hati terhadap organisasi yang bersikap radikal, seperti yang dikemukakan oleh Sartono Kartodirjo sebagai berikut:

Dalam menghadapi aksi-aksi yang dilancarkan oleh organisasi-organisasi pergerakan nasional yang semakin gencar dan radikal itu, pemerintah kolonial merasa semakin terancam kedudukan dan otoritasnya sehingga tidak segan-segan melakukan tindakan tegas terhadap aksi-aksi tersebut (Sartono Kartodirjo; 1993; 147).

Gerakan pemuda termasuk seperti organisasi pergerakan nasional lainnya tidak bebas dari pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Pada hakikatnya gerakan pemuda juga sama dengan organisasi pergerakan nasional lain terutama partai-partai nasional, yang berbeda hanya usia dari anggotanya. Dalam soal nasionalisme gerakan pemuda sering lebih berani dan lebih fanatik daripada partai-partai nasional. Oleh karena itu pengawasan terhadap gerakan pemuda oleh pihak pemerintah juga tidak berbeda. Pembekuan dan larangan bersidang juga dikenakan pada gerakan pemuda (Slamet Mulyono, 1986:97).

Ketika PPPI berdiri, gubernur jendral yang berkuasa adalah De Graeff. Ia merupakan gubernur jendral yang cukup liberal dan penganut politik etis bila dibandingkan dengan gubernur jendral sebelumnya. Pada masa pemerintahannya, aksi pergerakan nasional termasuk yang dipandang sebagai suatu tuntutan histories mendesak. Untuk ia mengharapkan dapat merangkul para nasionalis Indonesia sebagai rekan kerja sama dan dirinya dijadikan sebagai jembatan penghubung antara kepentingan gerakan nasionalis dengan kepentingan pemerintah. De Graeff seorang yang dianggap moderat oleh sebagian kalangan pergerakan nasionalis, apabila dibandingkan dengan pejabat sebelumnya, yaitu De Fock. Ia sering memberikan keluasaan kepada para tokoh pergerakan. Namun menjelang PPPI lahir sikap De Graeff berubah karena pemberontakan PKI 1926. ia memberikan instruksi pada aparatnya agar tidak mengambil tindakan ceroboh dan harus hati-hati terhadap organisasi pergerakan nasional. Seperti yang dikemukakan pada pembahasan sebelumnya pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang sangat ketat, semua kegiatan yang akan dilakukan haruslah sepengetahuan dan seizin pemerintah. Walaupun begitu ia tetap merupakan seorang moderat apabila dibandingkan dengan pejabat sebelumnya yaitu De Fock, ia tetap memberikan keleluasaan kepada para tokoh pergerakan, bahkan mengizinkan Kongres Pemuda II, walaupun dengan syarat-syarat yang ketat (Suharto; 1996; 12).

Sumpah Pemuda sudah barang tentu tidak menyenangkan hati pemerintah Hindia Belanda. PID (*Politieke Inlichtingen Dients*) makin lama makin keras dan agresif serta kejam. Nama Indonesia tidak disenangi oleh pemerintah Belanda. Maka tidak mengherankan, bahwa lagu Indonesia Raya dan lagu perjuangan lainnya dilarang, juga bendera Merah-Putih masuk dalam kategori itu (*45 Tahun Sumpah Pemuda*; 1974; 183).

Kemudian setelah ketidakberhasilan dalam memberikan peringatan dalam Volksraad, pemerintah mulai mengadakan tindakan yang tegas dengan melaksanakan pengeledahan dan penangkapan dengan jalan mencari bukti-bukti dan dokumen yang selanjutnya akan diserahkan ke pengadilan. Banyak tokoh-tokoh pergerakan ditangkap diantaranya Soekarno, Gatot Mangkupradja, Maskoen dan Soepriadinata yang ditahan di Penjara Banceuy yang kemudian dihadapkan kemuka pengadilan *Landraad* Bandung. Dengan penangkapan tersebut diharapkan menjadi suatu peringatan keras terhadap aksi-aksi yang dilancarkan oleh tokoh-tokoh pergerakan khususnya PNI yang dianggap cukup berbahaya dan punya pengaruh kuat dalam pergerakan nasional. Namun akibat adanya penahanan dan larangan yang membatasi gerak langkah organisasi pergerakan tersebut, ternyata muncul aksi-aksi di bawah tanah dengan melakukan pemogokan terhadap tindakan-tindakan pemerintah tersebut, termasuk yang dilakukan PPPI. Pada waktu pemerintah kolonial Belanda bertindak keras membubarkan PNI seperti diungkapkan di atas, PPPI mengadakan "*Protest Vergadering*" (Rapat Protes) pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 2 Mei 1931. intinya mereka menentang sikap tersebut dan menentang kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda. Hal ini memberikan dampak makin ketatnya pengawasan pemerintah Belanda terhadap PPPI (Margono; 1990; 144).

Dalam masa krisis pengawasan pemerintah terhadap gerakan pemuda terlalu keras. Hal itu bertalian erat dengan peningkatan rasa kebangsaan pada para pemuda dan sikap kaku dari pihak Gubernur Jendral De Jonge. De Jonge Gubernur Jendral Hindia Belanda yang diangkat pada tanggal 12 September 1931 merupakan seorang yang konservatif. Ia adalah mantan menteri peperangan dan Direktur Royal

Dutch. Dalam pidato pelantikannya (12 September 1931) ia telah bertekad untuk mengadakan tindakan-tindakan yang mendalam di bidang politik dan ekonomi agar dapat bertahan lama dalam menghadapi jaman krisis. Gubernur Jendral ini tidak mau tahu tentang pergerakan nasional, ia memandang bahwa pergerakan nasional itu sebagai hal yang harus diurus oleh polisi. Sikapnya seperti seorang diktator, kurang bijaksana dan kurang pengertian terhadap kepentingan dalam kesulitan rakyat (Sagimun M.D; 1990; 96).

Di bawah pemerintahannya yang sangat menderita adalah golongan non-kooperator. Larangan berkumpul dan berapat, pembatasan terhadap kemerdekaan pers, wewenang menghentikan untuk sementara rapat-rapat jika terdapat kata-kata yang dipandang bertentangan dengan kepentingan umum, dan penangkapan serta pengasingan adalah beberapa senjata yang digunakannya. Akibat dari tindakannya, bukan hanya partai-partai non-kooperasi yang menderita, tetapi perkumpulan-perkumpulan lainnya juga ikut menderita. Pembesar-pembesar polisi menghadiri rapat-rapat dengan sekehendak hati melarang pembicara atau menutup rapat itu. Tindakan yang sangat mendalam dari pemerintahannya adalah dilaksanakannya hak luar biasa gubernur jendral yaitu *exorbitante rechten*, yang memberi wewenang kepadanya untuk mengasingkan siapa saja yang dipandang membahayakan ketertiban umum. Mereka yang terkena hak luar biasa ini ada yang dibuang ke *Boven Digul*, suatu tempat yang dibangun pada tahun 1927 bagi mereka yang terlibat pemberontakan PKI tahun 1926-1927 (Suharto; 1996; 13).

Tekanan keras terhadap kaum pergerakan yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda juga semakin dirasakan oleh PPPI. Pada tahun 1932 salah seorang tokoh PPPI, Djohan Sjahroezah, ditangkap polisi karena tulisannya di

majalah PPPI. Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum (*Rechtshogeschool*) ini kemudian dibela oleh Agus Salim dalam persidangan, sehingga hukumannya berkurang satu setengah tahun. Setelah keluar dari tahanan, Djohan Sjahroezah disodori sebuah surat ancaman yang menyatakan bahwa kalau ia masih ingin melanjutkan sekolahnya, ia tidak boleh mencampuri urusan politik lagi. Akibatnya, sampai Jepang masuk ia tidak menamatkan kuliahnya. Masalah penerbitan PPPI ini terulang lagi pada tahun 1936. kali ini pemerintah kolonial menyita semua majalah PPPI. Pada tahun yang sama pemerintah kolonial melarang PPPI mengadakan kongres kelima. Taktik ampuh yang digunakan pemerintah Belanda dalam menekan pergerakan pemuda adalah menekan para wali atau orang tua pemuda-pemudi yang turun dalam pergerakan pemuda khususnya PPPI diancam kedudukannya. Taktik yang lain adalah dengan menggunakan istilah politik sebagai alat pemukul. Karena sulitnya membedakan antara politik praktis dan politik teoritis, bahkan definisi politik pun dianggap kotor, maka seringkali PPPI dipukul dengan rumusan politik. Maka PID mendatangi rapat tertutup dan melarang pemuda-pemudi yang belum berusia 18 tahun menghadiri rapat anggota (*45 tahun Sumpah Pemuda*; 1974; 183). Setelah Gubernur Jendral De Jonge digantikan oleh Gubernur Jendral Carda van Starhenborgh Stachuwer tindakan keras dari pemerintah agak berkurang. Dalam pidato pelantikannya (15 September 1938) secara keseluruhan tidak ada suara baru. Pemerintahannya agak luwes, politik penindasan diganti dengan kebijaksanaan lain. Pada masa Carda pergerakan nasional terlepas dari tekanan, walaupun diakhir kekuasaannya sikap keras terhadap pergerakan nasional dilakukan lagi (Suharto; 1996; 14).

Kesimpulan

1. PPPI mempunyai peran besar dalam kegiatan bidang politik. Kegiatan PPPI yang paling menonjol adalah keterlibatan PPPI dalam penyelenggaraan Kongres Pemuda II tanggal 27-28 Oktober 1928 di Jakarta yang menghasilkan Sumpah Pemuda.
2. Kegiatan PPPI dalam bidang sosial-budaya, dalam bidang sosial PPPI bergerak dalam dunia pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan rakyat Indonesia yang mayoritasnya masih terbelenggu oleh kebodohan. Hal ini lebih didasarkan pada tanggung jawab moral PPPI sebagai organisasi pemuda untuk memberikan pendidikan bagi rakyat Indonesia. Sedangkan di bidang budaya anggota PPPI mempunyai kegiatan untuk melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Kebudayaan yang menjadi pusat perhatian adalah bidang seni tari.
3. Kegiatan PPPI dalam bidang ekonomi adalah memberikan keterangan kepada petani Indonesia mengenai hak milik atas tanah agar tidak menjual tanah kepada bangsa asing. Tujuan itu semua adalah untuk meningkatkan produksi hasil pertanian para petani. Sebagai organisasi yang beranggotakan para pemuda terpelajar, PPPI yang berdiri sejak tahun 1926-1942 telah banyak memberikan kontribusi positif dalam perjuangan pergerakan nasional Indonesia. Para anggota PPPI telah mencurahkan segala daya upaya untuk mencapai tujuan organisasi ini, yaitu untuk menghapuskan dan menenyapkan penjajahan untuk kemerdekaan Indonesia.

A.K. Pringgodigdo. 1986. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Liberti : Yogjakarta.

Ensiklopedi Nasional Indonesia 13. 1990 Perpy. Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka.

Sangimun. M.D. 1990. *Peran Pemuda Sampai Proklamasi*. Jakarta : PT. Bina Aksara.

Sartono, Kartodirjo. 1993. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru II : Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme*. Jakarta : Rineke Cipta

Slamet, Mulyono. 1986. *Kesadaran Nasional Dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan Jilid 2*. Jakarta : Inti dayu Press.

Sudiyo. 1991. *Perhimpunan Indonesia Sampai Dengan Lahirnya Sumpah Pemuda*. Jakarta : Rineke Cipta.

Sutrisno, Kutoyo. 1975. *Profesor Muhammad Yamin, S.H.* Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sri Sutjiatiningsih. 1999. *Soegondo Djojopoepito : Hasil Karya dan Pengabdianya*. Jakarta : Departement Pendidikan dan Kebudayaan.

Sumadi Suryabrata. 2000. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Rajawali.

REFERENSI

Abdurahman, Dudung. 2011 . *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.